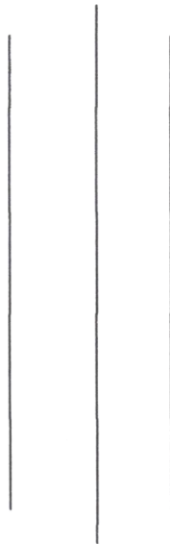




PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2025



**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TABALONG**

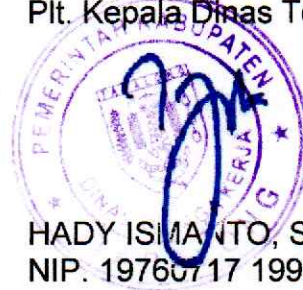
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026.

Dokumen Perubahan Renja ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong beserta indikatornya, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon koreksi, saran dan masukan dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong ini dapat bermanfaat dan diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung, Agustus 2025
Mengetahui :
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja



HADY ISMA NTO, S.SOS, M.AP
NIP. 19760717 199511 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaaan	11
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	19
2.3. Isu-Isu Penting Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	21
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD	28
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
BAB IV PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan s.d Triwulan I Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	11
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong s/d Maret 2025 dan Pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025	12
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	20
Tabel 2.4	Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 ..	30
Tabel 3.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	38
Tabel 3.2	Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan konsekuensi dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai wujud implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025. Renja Tahun 2025 telah disusun pada Tahun 2024 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Seiring dengan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2025, hasil pengendalian pelaksanaan renja menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Renja Bapperida Tahun 2025. Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor B-77/BAPPERIDA/000.7/III/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, bahwa SKPD melakukan penyesuaian

terhadap Renja sehubungan dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Selain berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2025, Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan(Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah diubah berkali kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 07);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 14).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong tahun 2025 merupakan suatu langkah strategis yang terstruktur untuk mengarahkan serta mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan

kesejahteraan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Tabalong. Rencana ini tidak hanya sekadar panduan operasional, tetapi juga menjadi fondasi untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang inklusif, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

A. Maksud

a. Perencanaan Terstruktur:

- Pengarahan Sistematis: Menyusun rencana kerja yang sistematis dan terstruktur sebagai panduan utama dalam pelaksanaan program-program ketenagakerjaan, memastikan setiap langkah yang diambil berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan strategis.
- Kerangka Kerja yang Konsisten: Mengembangkan kerangka kerja yang konsisten dan komprehensif, yang mencakup berbagai aspek penting dari ketenagakerjaan, mulai dari pelatihan hingga penempatan kerja.

b. Sinkronisasi Kebijakan:

- Harmonisasi Kebijakan: Menciptakan keselarasan antara kebijakan nasional, regional, dan lokal, serta kebijakan dinas terkait, sehingga semua program kerja yang dilaksanakan mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tabalong secara sinergis.
- Integrasi Multi-level: Mengintegrasikan kebijakan di berbagai level pemerintahan untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dan setiap kebijakan saling mendukung.

c. Penggunaan Sumber Daya Optimal:

- Efisiensi Sumber Daya: Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun fasilitas, untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pengembangan sektor ketenagakerjaan.

- Alokasi yang Tepat: Memastikan alokasi sumber daya dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran, berdasarkan analisis kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan.
- d. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi:
- Transparansi Proses: Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program kerja, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan menilai kinerja Dinas Tenaga Kerja secara objektif.
 - Pelaporan Terbuka: Membuka akses terhadap laporan kinerja dan penggunaan anggaran, memastikan semua pihak dapat melihat dan memahami kemajuan serta tantangan yang dihadapi.

B. Tujuan

- a. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja:
- Program Pelatihan Komprehensif: Melaksanakan berbagai program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, sehingga mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.
 - Sertifikasi dan Kompetensi: Mendorong sertifikasi keterampilan untuk memastikan tenaga kerja memiliki standar kompetensi yang diakui secara nasional dan internasional.
- b. Pengurangan Tingkat Pengangguran:
- Penempatan Kerja Efektif: Mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Tabalong melalui program-program penempatan kerja, bursa kerja, dan pemberdayaan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan.

- Stimulus Ekonomi Lokal: Mengembangkan program yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor formal.
- c. Perlindungan Tenaga Kerja:
- Regulasi dan Pengawasan: Meningkatkan perlindungan hak-hak tenaga kerja melalui penegakan regulasi ketenagakerjaan yang ketat dan pengawasan yang efektif.
 - Lingkungan Kerja Aman: Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta mempromosikan kesejahteraan pekerja melalui program-program kesejahteraan dan kesehatan kerja.
- d. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas:
- Akses dan Kesempatan Kerja: Meningkatkan akses dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui program pelatihan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
 - Kampanye Kesadaran: Melakukan kampanye kesadaran untuk mengubah persepsi dan stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas, serta mendorong inklusivitas di tempat kerja.
 - Fasilitasi dan Pendampingan: Memberikan pendampingan dan dukungan berkelanjutan dalam proses penempatan kerja dan pengembangan karir bagi penyandang disabilitas.
- e. Pengembangan Ekonomi Lokal:
- Tenaga Kerja Berkualitas: Mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan siap kerja, sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah dan menarik investasi.

- Kolaborasi dengan Industri: Membangun kemitraan dengan berbagai sektor industri untuk menciptakan peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

f. Kerjasama dan Kolaborasi:

- Sinergi Multi-pihak: Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas, untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan ketenagakerjaan.
- Platform Kolaboratif: Membentuk platform kolaboratif yang memungkinkan berbagai pemangku kepentingan berbagi ide dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

g. Inovasi dan Adaptasi Teknologi:

- Penggunaan Teknologi Modern: Mendorong inovasi dan adaptasi teknologi dalam berbagai program kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan ketenagakerjaan.
- Transformasi Digital: Melaksanakan transformasi digital dalam sistem pelayanan untuk memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat.

h. Pemantauan dan Evaluasi:

- Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program kerja untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- Perbaikan Berkelanjutan: Mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan mengimplementasikan tindakan korektif untuk meningkatkan kualitas program dan layanan.

Dengan maksud dan tujuan yang komprehensif ini, rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong tahun 2025 diharapkan dapat

menjadi pedoman yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengembangan sektor ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan, Kabupaten Tabalong dapat mewujudkan visi sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Tujuan
- 1.4 Sistemastika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 (satu) posisi bulan Maret Tahun 2025, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan s.d Triwulan I Tahun 2025
 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	% 2025
PENDAPATAN DAERAH	562.000.000,00	73.831.278,00	13,14
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	562.000.000,00	73.831.278,00	13,14
Retribusi Daerah	562.000.000,00	73.831.278,00	13,14
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	562.000.000,00	73.831.278,00	13,14
BELANJA DAERAH	30.205.354.160,00	2.756.341.775,00	9,13
BELANJA OPERASI	28.938.489.973,00	2.756.341.775,00	9,52
Belanja Pegawai	7.306.326.000,00	1.163.899.787,00	15,93
Belanja Barang dan Jasa	21.632.163.973,00	1.592.441.988,00	7,36
BELANJA MODAL	1.266.864.187,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.108.564.187,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	144.300.000,00	0,00	0,00

Sedangkan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Renja Tahun 2025 sampai dengan bulan Maret 2025 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong s/d Maret 2025 dan
Pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sub kegiatan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan sub Kegiatan 2025			Target Program dan Kegiatan sub kegiatan renstra 2025	Perkiraan Realisasi Capaian		
					Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD tahun 2025 s/d Maret 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	Catatan
1	2	3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	75	75,34	75	-	0%	75	75	100%	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	10 Dokumen	100%	50%	50%	100%	100%	100%	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	50%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	
2.07.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	-	1 Data	-	0%	1 Data	1 Data	100%	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	35 Orang/bulan	30 Orang/bulan	33 Orang/bulan	100%	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sub kegiatan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan sub Kegiatan 2025			Target Program dan Kegiatan sub kegiatan renstra 2025	Perkiraan Realisasi Capaian		
					Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD tahun 2025 s/d Maret 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	Catatan
1	2	3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 orang	8 orang	8 orang	0	0%	8 orang	8 orang	100%	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	9%	9%	100%	100%	100%	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	4 Paket	7 Paket	1 Paket	14%	7 Paket	7 Paket	100%	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	52 Paket	12 Paket	52 Paket	0	0%	52 Paket	52 Paket	100%	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	12 Paket	20 Paket	2 Paket	10%	20 Paket	20 Paket	100%	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	8%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	87 Laporan	80 Laporan	20 Laporan	25%	80 Laporan	80 Laporan	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sub kegiatan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan sub Kegiatan 2025			Target Program dan Kegiatan sub kegiatan renstra 2025	Perkiraan Realisasi Capaian		
					Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD tahun 2025 s/d Maret 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	Catatan
1	2	3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	42 unit	31 Unit	0	0%	31 Unit	31 Unit	100%	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	28%	28%	100%	100%	100%	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	25%	4 Laporan	4 Laporan	100%	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	33%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	34%	34%	100%	100%	100%	
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	18 Unit	22 Unit	22 Unit	100%	22 Unit	22 Unit	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sub kegiatan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan sub Kegiatan 2025			Target Program dan Kegiatan sub kegiatan renstra 2025	Perkiraan Realisasi Capaian		
					Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD tahun 2025 s/d Maret 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	Catatan
1	2	3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	30 Unit	42 Unit	1 Unit	2%	42 Unit	42 Unit	100%	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 unit	1 Unit	-	0%	1 Unit	1 Unit	100%	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentasi pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tenaga kerja	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Prosentase Rekomendasi Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang dilaksanakan oleh SKPD	20%	1 Dokumen	20%	0%	0%	20%	20%	100%	
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
2.07.02.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	20 orang	-	20 orang	-	0%	20 orang	20 orang	100%	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang Mendapatkan Sertifikat Kompetensi	100%	138 orang	100%	0%	0%	100%	100%	100%	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase penduduk usia kerja yang dilatih	100%	88%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	336 orang	336 Orang	336 orang	-	0%	336 orang	336 orang	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sub kegiatan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan sub Kegiatan 2025			Target Program dan Kegiatan sub kegiatan renstra 2025	Perkiraan Realisasi Capaian		
					Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD tahun 2025 s/d Maret 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	Catatan
1	2	3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang dibina	100%	30 Lembaga	100%	0%	0%	100%	100%	100%	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	-	0%	30 Lembaga	30 Lembaga	100%	
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan kecil (UMKM) yang tingkatkan produktivitas nya	100%	20 Perusahaan	100%	0%	0%	100%	100%	100%	
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	20 Perusahaan	50 Perusahaan	-	0%	50 Perusahaan	50 Perusahaan	100%	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	50%	1217 orang	50%			50%	50%	100%	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan / Bimbingan Teknis	500 orang	1	500 orang	202 orang	40%	500 orang	500 orang	100%	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	740 orang	510 orang	740 orang	202 orang	27%	740 orang	740 orang	100%	
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	5 orang	20 Orang	5 orang	-	0%	5 orang	5 orang	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sub kegiatan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan sub Kegiatan 2025			Target Program dan Kegiatan sub kegiatan renstra 2025	Perkiraan Realisasi Capaian		
					Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD tahun 2025 s/d Maret 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	Catatan
1	2	3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	656 orang	336 orang	656 orang	-	0%	656 orang	656 orang	100%	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	1000 orang	23%	1000 orang	319 orang	32%	1000 orang	1000 orang	100%	
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500 orang	12 Dokumen	2500 orang	568 orang	23%	2500 orang	2500 orang	100%	
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	40 orang	156 orang	40 orang	-	0%	40 orang	40 orang	100%	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Angka PHK	1%	85%	1%	0,24%	0,24%	1%	1%	100%	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perusahaan yang Memenuhi Hak Tenaga Kerja	90%	90%	90%	40%	44%	90%	90%	100%	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	8%	4 Laporan	4 Laporan	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sub kegiatan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan sub Kegiatan 2025			Target Program dan Kegiatan sub kegiatan renstra 2025	Perkiraan Realisasi Capaian		
					Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD tahun 2025 s/d Maret 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	Catatan
1	2	3	4	5	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan	90%	80%	90%	70%	78%	90%	90%	100%	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	11 Perkara	10 Perkara	2 perkara	20%	10 Perkara	10 Perkara	100%	
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	24800 orang	-	24800 orang	8350 orang	34%	24800 orang	24800 orang	100%	

Berdasarkan data pada tabel 2.1 tersebut, dapat dilihat bahwa dari sisi anggaran, Dinas Tenaga Kerja telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 2.756.341.775,- atau sekitar 9,13% dari total anggaran untuk tahun 2025. Pencapaian realisasi anggaran triwulan I relatif masih rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya memang dijadwalkan pada triwulan II, III dan IV.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong secara fungsi sangat erat terkait dengan program dan sasaran baik mulai dari tingkat Pusat, Provinsi sampai daerah, artinya bahwa setiap program kegiatan mempunyai benang merah mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah (sustainable programme). Adapun program/kegiatan dimaksud adalah terkait dengan menurunkan tingkat pengangguran yang merupakan program dalam skala prioritas di tingkat pusat, regional. Hal ini tercermin dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja yang tercakup dalam Program Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja dan ditunjang pula oleh kinerja keuangan yang baik dengan menggunakan prinsip 3e (ekonomis, efektif dan efisien) dengan mempertimbangkan azas money follow function. Keberhasilan program/ kegiatan yang ada tak lepas dari aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik internal dan eksternal.

Selama kurun waktu pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan, Keterampilan dan Produktivitas Kerja			292 orang/ 10 Paket	292 orang/ 10 Paket	435 orang	435 orang	313 orang	-	435 orang	435 orang	
2	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Terhadap Pencari Kerja			95%	95%	85%	85%	82,58%	-	85%	85%	
3	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Kesempatan Kerja dan WUB			80 orang	80 orang	176 orang	176 orang	114 orang	-	176 orang	176 orang	
4	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan HI			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
5	Persentase Peningkatan Kelembagaan HI dan Pengupahan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong

Dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong dihadapkan pada berbagai isu strategis yang menuntut perencanaan dan pelaksanaan program yang inovatif dan adaptif. Isu-isu ini mencakup perubahan struktur ekonomi, pengangguran, disrupsi teknologi, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, inklusivitas, kolaborasi, kebijakan dan regulasi, pengembangan sumber daya manusia, adaptasi terhadap perubahan lingkungan kerja, tantangan dalam layanan publik yang masih manual, serta kendala dalam penerapan digitalisasi layanan publik di tengah kurangnya literasi Internet of Things (IoT) di masyarakat. Berikut adalah narasi kompleks yang menggambarkan isu-isu strategis tersebut secara mendetail.

A. Perubahan Struktur Ekonomi

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Tabalong dari sektor agraris menuju sektor industri dan jasa membawa implikasi signifikan terhadap kebutuhan keterampilan tenaga kerja. Transformasi ini memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan yang lebih kompleks dan spesifik dibandingkan sebelumnya. Dalam konteks ini, Dinas Tenaga Kerja harus memainkan peran kunci dalam menyediakan pelatihan yang relevan dan terfokus pada pengembangan kompetensi yang sesuai dengan permintaan industri yang berkembang. Diversifikasi pekerjaan juga memerlukan strategi pelatihan yang holistik, memastikan bahwa tenaga kerja siap menghadapi berbagai jenis pekerjaan baru yang muncul.

B. Pengangguran dan Keterampilan Tenaga Kerja

Tantangan besar yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Isu ini, dikenal sebagai mismatch keterampilan, menuntut Dinas Tenaga Kerja untuk mengembangkan program pelatihan yang

disesuaikan dengan kebutuhan industri. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka, khususnya di kalangan pemuda dan lulusan baru, menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penempatan kerja yang lebih efektif, akses informasi pasar kerja yang lebih baik, serta program pemberdayaan yang dapat meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja muda.

C. Teknologi dan Digitalisasi

Perkembangan teknologi yang pesat membawa disrupsi yang signifikan terhadap dunia kerja. Otomatisasi dan digitalisasi mengubah lanskap pekerjaan, memunculkan jenis pekerjaan baru sekaligus menghilangkan beberapa pekerjaan lama. Dinas Tenaga Kerja harus mampu mengantisipasi dampak teknologi ini dengan menyediakan program pelatihan yang fokus pada keterampilan digital dan adaptasi teknologi. Selain itu, pengembangan ekonomi digital dan e-commerce dapat membuka peluang kerja baru yang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

D. Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan sosial bagi semua pekerja, termasuk pekerja informal dan penyandang disabilitas, menjadi isu strategis yang harus diatasi. Dinas Tenaga Kerja perlu memastikan bahwa semua pekerja memiliki akses ke perlindungan sosial yang memadai, termasuk asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu, peningkatan standar kesehatan dan keselamatan kerja menjadi prioritas untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap penerapan standar keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.

E. Inklusivitas dan Kesetaraan Kesempatan Kerja

Meningkatkan inklusivitas di tempat kerja dengan menyediakan lebih banyak peluang bagi penyandang disabilitas merupakan

tantangan penting. Dinas Tenaga Kerja harus mengembangkan program pelatihan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan memastikan adanya fasilitas yang mendukung. Selain itu, kesetaraan gender di tempat kerja harus didorong, memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama terhadap kesempatan kerja dan pengembangan profesional. Ini memerlukan kampanye kesadaran untuk mengubah persepsi dan stigma masyarakat serta mendorong inklusivitas di tempat kerja.

F. Kolaborasi dan Kemitraan

Kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas, menjadi strategi penting untuk mengatasi isu ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut untuk menciptakan program-program pelatihan yang relevan dan efektif. Selain itu, pengembangan program pemberdayaan komunitas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan ketenagakerjaan.

G. Kebijakan dan Regulasi

Penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan dengan perkembangan pasar kerja dan kebutuhan industri merupakan tantangan yang harus dihadapi. Dinas Tenaga Kerja perlu memastikan bahwa kebijakan yang ada mendukung penciptaan lapangan kerja baru dan perlindungan tenaga kerja. Penegakan hukum ketenagakerjaan juga harus diperkuat untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan.

H. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Vokasi

Penyediaan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan

industri yang terus berkembang merupakan isu strategis yang krusial. Pendidikan vokasi perlu ditingkatkan kualitas dan aksesibilitasnya untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan pasar kerja. Dinas Tenaga Kerja harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri dan menyediakan fasilitas pelatihan yang memadai.

I. Adaptasi Terhadap Perubahan Lingkungan Kerja

Perubahan pola kerja seperti remote working yang semakin umum memerlukan adaptasi dari sisi regulasi dan dukungan. Dinas Tenaga Kerja harus memastikan bahwa regulasi ketenagakerjaan dapat mengakomodasi perubahan ini dan memberikan dukungan yang memadai bagi pekerja yang bekerja dari jarak jauh. Selain itu, mendorong keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi menjadi penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja.

J. Tantangan Layanan Publik

Salah satu penghambat utama dalam layanan publik adalah masih adanya proses yang dilakukan secara manual. Hal ini berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa isu terkait layanan publik yang masih manual meliputi:

- **Proses Administrasi yang Lambat:** Proses administrasi yang dilakukan secara manual cenderung memakan waktu lebih lama, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam penanganan permohonan dan pengaduan dari masyarakat.
- **Kurangnya Transparansi:** Sistem manual seringkali kurang transparan, sehingga sulit bagi masyarakat untuk memantau perkembangan permohonan mereka. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap layanan publik.

- **Risiko Kesalahan Manusia:** Proses manual rentan terhadap kesalahan manusia, baik dalam penginputan data maupun dalam pemrosesan informasi. Kesalahan ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan data dan pelayanan yang tidak maksimal.
- **Akses Terbatas:** Layanan manual biasanya memerlukan kehadiran fisik, yang dapat menyulitkan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan mobilitas.
- **Biaya Operasional yang Tinggi:** Proses manual sering kali memerlukan biaya operasional yang lebih tinggi, baik untuk tenaga kerja maupun untuk bahan-bahan fisik seperti kertas dan tinta.

Untuk mengatasi tantangan ini, Dinas Tenaga Kerja perlu mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam proses layanannya. Digitalisasi layanan publik tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memungkinkan akses yang lebih luas dan mudah bagi masyarakat. Implementasi sistem layanan berbasis online, pengembangan aplikasi mobile, serta peningkatan infrastruktur teknologi menjadi langkah-langkah strategis yang harus diambil.

K. Kendala Penerapan Digitalisasi Layanan Publik di Tengah Kurangnya Literasi Internet of Things (IoT) di Masyarakat

Meskipun digitalisasi menawarkan banyak manfaat, penerapannya di Kabupaten Tabalong dihadapkan pada kendala literasi teknologi yang masih rendah di kalangan masyarakat. Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi, khususnya IoT, menjadi penghambat utama dalam transformasi digital layanan publik. Beberapa kendala spesifik yang dihadapi meliputi:

- **Literasi Digital yang Rendah:** Banyak masyarakat yang belum familiar dengan teknologi digital, yang menghambat mereka dalam memanfaatkan layanan publik berbasis teknologi. Pelatihan dan

edukasi mengenai penggunaan teknologi digital menjadi sangat penting.

- **Akses Internet yang Terbatas:** Di beberapa daerah, akses terhadap internet masih terbatas, baik dari segi infrastruktur maupun keterjangkauan biaya. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan digital.
- **Resistensi terhadap Perubahan:** Sebagian masyarakat cenderung resistif terhadap perubahan, terutama perubahan yang melibatkan teknologi baru. Dibutuhkan pendekatan yang efektif untuk mengedukasi dan mengubah pola pikir masyarakat.
- **Ketersediaan Perangkat Teknologi:** Tidak semua masyarakat memiliki akses ke perangkat teknologi yang memadai, seperti komputer atau smartphone, yang diperlukan untuk mengakses layanan digital.
- **Keamanan Data dan Privasi:** Kekhawatiran mengenai keamanan data dan privasi juga menjadi penghalang dalam penerapan digitalisasi layanan publik. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa data mereka akan aman dan privasi mereka terlindungi.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, Dinas Tenaga Kerja dapat mengambil beberapa langkah strategis:

- **Edukasi dan Pelatihan:** Menyediakan program edukasi dan pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan dalam menggunakan teknologi IoT.
- **Pengembangan Infrastruktur:** Bekerjasama dengan penyedia layanan internet untuk meningkatkan akses internet di daerah-daerah terpencil dan mengupayakan biaya yang lebih terjangkau.
- **Sosialisasi dan Kampanye:** Melakukan sosialisasi dan kampanye untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat digitalisasi dan mengatasi resistensi terhadap perubahan.
- **Dukungan Perangkat Teknologi:** Menyediakan akses terhadap perangkat teknologi melalui program bantuan atau subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan.

- **Keamanan dan Privasi:** Memastikan bahwa sistem digital yang digunakan memiliki standar keamanan yang tinggi dan transparansi dalam pengelolaan data pribadi.

L. Persiapan Menghadapi Green Economy

Pergeseran global menuju ekonomi hijau atau green economy menjadi isu strategis yang semakin penting untuk dihadapi, termasuk bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong. Ekonomi hijau berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan, penggunaan sumber daya alam yang efisien, dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja perlu mempersiapkan diri menghadapi isu green economy pada tahun 2025 dengan beberapa alasan penting:

- **Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan:** Transformasi menuju ekonomi hijau membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan khusus di bidang energi terbarukan, manajemen lingkungan, teknologi hijau, dan praktik bisnis berkelanjutan. Dinas Tenaga Kerja harus menyediakan pelatihan yang relevan untuk mengembangkan keterampilan ini.
- **Penyerapan Tenaga Kerja Baru:** Ekonomi hijau berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, dan pembangunan infrastruktur hijau. Dinas Tenaga Kerja perlu mempersiapkan tenaga kerja yang siap mengisi posisi-posisi ini.
- **Kepatuhan terhadap Regulasi Lingkungan:** Dengan semakin ketatnya regulasi lingkungan baik di tingkat nasional maupun internasional, perusahaan akan memerlukan tenaga kerja yang paham dengan standar-standar lingkungan yang harus dipenuhi. Pelatihan mengenai regulasi dan praktik terbaik di bidang lingkungan menjadi krusial.

- Mendorong Inovasi dan Daya Saing: Adopsi teknologi hijau dan praktik bisnis berkelanjutan dapat meningkatkan daya saing perusahaan lokal di pasar global. Dinas Tenaga Kerja dapat berperan dalam mendorong inovasi melalui program pelatihan dan insentif bagi perusahaan yang berinovasi di bidang green economy.
- Kesadaran dan Edukasi Publik: Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya green economy juga menjadi tugas penting. Dinas Tenaga Kerja dapat menyelenggarakan kampanye dan program edukasi untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya keberlanjutan lingkungan.

Dengan mengidentifikasi dan mengelola isu-isu strategis ini secara komprehensif, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tabalong. Strategi yang tepat akan memastikan bahwa tenaga kerja di daerah ini siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di masa depan, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, produktif, dan berdaya saing tinggi.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Perubahan Rkpd

Rumusan tematik pembangunan sebagaimana disebutkan dalam RKPD Tahun 2025 adalah “Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Tabalong yang Sejahtera Dinamis, Maju dan Berkelanjutan” dengan 5 prioritas daerah dan sasaran pembangunan yang upaya pencapaiannya dijabarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Adapun 5 (lima) prioritas daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan, pelayanan Kesehatan untuk penurunan stunting untuk pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung IKN;
4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal; dan
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

RKPD Tahun 2025 dalam hal ini mengalami perubahan diantaranya dari segi rumusan kegiatan dan sub kegiatan. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rancangan Perubahan RKPD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, maka dalam reviu ini akan dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Kode	RANCANGAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP	75	9.596.258.476	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP	75	9.596.258.476
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	43.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	43.500.000
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	41.750.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	41.750.000
2.07.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1.750.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1.750.000
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	100%	7.340.406.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	100%	7.340.406.000
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	7.340.406.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	7.340.406.000

Kode	RANCANGAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20.000.000
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 orang	20.000.000
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	313.998.037	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	313.998.037
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	5.999.282	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	5.999.282
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	52 Paket	47.258.714	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	52 Paket	47.258.714
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	39.296.641	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	39.296.641
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	17.240.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	17.240.000

Kode	RANCANGAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	204.203.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	204.203.400
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya barang milik daerah	100%	328.421.885	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya barang milik daerah	100%	328.421.885
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	328.421.885	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	328.421.885
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	1.067.562.554	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	1.067.562.554
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.500.000
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	325.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	325.400.000
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	736.662.554	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	736.662.554
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	482.370.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	482.370.000

Kode	RANCANGAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Daerah		Daerah			Daerah		Daerah		
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	297.660.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	297.660.000
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	22.210.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	22.210.000
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	162.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	162.500.000
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentasi pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tenaga kerja	100%	224.160.893	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentasi pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tenaga kerja	100%	224.160.893
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Prosentase Rekomendasi Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang dilaksanakan oleh SKPD	20%	224.160.893	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Prosentase Rekomendasi Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang dilaksanakan oleh SKPD	20%	224.160.893
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	113.647.180	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	113.647.180
2.07.02.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	20 orang	110.513.713	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	20 orang	110.513.713

Kode	RANCANGAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang Mendapatkan Sertifikat Kompetensi	100%	6.157.260.738	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang Mendapatkan Sertifikat Kompetensi	100%	6.157.260.738
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase penduduk usia kerja yang dilatih	100%	5.724.712.758	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase penduduk usia kerja yang dilatih	100%	5.724.712.758
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	336 orang	5.724.712.758	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	336 orang	5.724.712.758
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase LPK yang dibina	100%	98.484.500	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase LPK yang dibina	100%	98.484.500
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga	98.484.500	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga	98.484.500
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Persentase Perusahaan kecil (UMKM) yang tingkatkan produktivitas nya	100%	334.063.480	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Persentase Perusahaan kecil (UMKM) yang tingkatkan produktivitas nya	100%	334.063.480
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	334.063.480	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	334.063.480
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	50%	8.603.990.153	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	50%	8.603.990.153

Kode	RANCANGAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan / Bimbingan Teknis	500 orang	8.028.241.816	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan / Bimbingan Teknis	500 orang	8.028.241.816
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	740 orang	7.450.155.877	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	740 orang	7.450.155.877
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	5 orang	59.626.256	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	5 orang	59.626.256
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	656 orang	518.459.683	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	656 orang	518.459.683
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	1000 orang	575.748.337	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	1000 orang	575.748.337
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500 orang	305.100.017	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500 orang	305.100.017
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	40 orang	270.648.320	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	40 orang	270.648.320
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Angka PHK	1%	5.623.683.900	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Angka PHK	1%	5.623.683.900

Kode	RANCANGAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Perusahaan yang Memenuhi Hak Tenaga Kerja	90%	251.019.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Perusahaan yang Memenuhi Hak Tenaga Kerja	90%	251.019.000
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	251.019.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	251.019.000
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan	90%	5.372.664.900	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan	90%	5.372.664.900
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	122.153.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	122.153.000

Kode	RANCANGAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	24800 orang	5.250.511.900	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	24800 orang	5.250.511.900
					30.205.354.160					30.205.354.160

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan prioritas pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong telah ditetapkan program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada perubahan tahun melalui 5 (lima) program 15 (lima belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan , sebagai berikut:

Tabel 3.1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	8. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	17. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
			18. Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	9. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	19. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
		10. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		11. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	21. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	12. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	22. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
			23. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
			24. Perluasan Kesempatan Kerja
		13. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	25. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	14. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
		15. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	28. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			29. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Rencana kerja dan pendanaan pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.2. dibawah ini

Tabel 3.2
Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	APBD 2025				Rencana Tahun 2025 (Setelah Perubahan)			
			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6		4	5	6	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disnaker	Nilai AKIP	75	9.590.456.311	APBD	Nilai AKIP	75	9.596.258.476	APBD
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	43.500.000	APBD	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	43.500.000	APBD
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	35.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	41.750.000	APBD
2.07.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Disnaker	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	8.500.000	APBD	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1.750.000	APBD
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disnaker	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	100%	7.340.406.000	APBD	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	100%	7.340.406.000	APBD
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	7.340.406.000	APBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	7.340.406.000	APBD
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disnaker	Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	50.000.000	APBD	Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20.000.000	APBD

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	APBD 2025				Rencana Tahun 2025 (Setelah Perubahan)			
			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6		4	5	6	
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disnaker	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 orang	50.000.000	APBD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	20.000.000	APBD
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disnaker	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	431.909.872	APBD	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	313.998.037	APBD
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	5.999.282	APBD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	5.999.282	APBD
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	52 Paket	52.308.538	APBD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	52 Paket	47.258.714	APBD
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disnaker	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	45.497.580	APBD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	39.296.641	APBD
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	17.240.000	APBD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	17.240.000	APBD
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	310.864.472	APBD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	204.203.400	APBD
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disnaker	Tersedianya barang milik daerah	100%	328.421.885	APBD	Tersedianya barang milik daerah	100%	328.421.885	APBD

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	APBD 2025				Rencana Tahun 2025 (Setelah Perubahan)			
			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6		4	5	6	
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	328.421.885	APBD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	328.421.885	APBD
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	907.638.554	APBD	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	1.067.562.554	APBD
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.500.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.500.000	APBD
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	187.400.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	325.400.000	APBD
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	714.738.554	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	736.662.554	APBD
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	488.580.000	APBD	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	482.370.000	APBD
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	297.660.000	APBD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	297.660.000	APBD
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	28.420.000	APBD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	22.210.000	APBD
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disnaker	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	162.500.000	APBD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	162.500.000	APBD

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	APBD 2025				Rencana Tahun 2025 (Setelah Perubahan)			
			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6		4	5	6	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Disnaker	Persentasi pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tenaga kerja	100%	192.423.117	APBD	Persentasi pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tenaga kerja	100%	224.160.893	APBD
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Disnaker	Prosentase Rekomendasi Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang dilaksanakan oleh SKPD	20%	192.423.117	APBD	Prosentase Rekomendasi Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang dilaksanakan oleh SKPD	20%	224.160.893	APBD
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Disnaker	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	66.534.904	APBD	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	113.647.180	APBD
2.07.02.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Disnaker	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	20 orang	125.888.213	APBD	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	20 orang	110.513.713	APBD
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Disnaker	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang Mendapatkan Sertifikat Kompetensi	100%	2.368.386.630	APBD	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang Mendapatkan Sertifikat Kompetensi	100%	6.157.260.738	APBD
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Disnaker	Persentase penduduk usia kerja yang dilatih	100%	2.071.745.630	APBD	Persentase penduduk usia kerja yang dilatih	100%	5.724.712.758	APBD
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	336 orang	2.071.745.630	APBD	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	336 orang	5.724.712.758	APBD
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker	Persentase LPK yang dibina	100%	79.485.000	APBD	Persentase LPK yang dibina	100%	98.484.500	APBD
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga	79.485.000	APBD	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga	98.484.500	APBD

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	APBD 2025				Rencana Tahun 2025 (Setelah Perubahan)			
			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6		4	5	6	
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Disnaker	Persentase Perusahaan kecil (UMKM) yang tingkatkan produktivitas nya	100%	217.156.000	APBD	Persentase Perusahaan kecil (UMKM) yang tingkatkan produktivitas nya	100%	334.063.480	APBD
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Disnaker	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	217.156.000	APBD	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	334.063.480	APBD
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Disnaker	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	50%	3.136.504.648	APBD	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	50%	8.603.990.153	APBD
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan / Bimbingan Teknis	500 orang	2.752.776.728	APBD	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan / Bimbingan Teknis	500 orang	8.028.241.816	APBD
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	740 orang	1.722.425.956	APBD	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1380 orang	7.450.155.877	APBD
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	5 orang	50.000.000	APBD	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	5 orang	59.626.256	APBD
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	656 orang	980.350.772	APBD	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	96 orang	518.459.683	APBD
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	1000 orang	383.727.920	APBD	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	1000 orang	575.748.337	APBD

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	APBD 2025				Rencana Tahun 2025 (Setelah Perubahan)			
			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6		4	5	6	
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500 orang	105.240.600	APBD	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500 orang	305.100.017	APBD
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	40 orang	278.487.320	APBD	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	40 orang	270.648.320	APBD
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Disnaker	Persentase Angka PHK	1%	5.450.245.900	APBD	Persentase Angka PHK	1%	5.623.683.900	APBD
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Prosentase Perusahaan yang Memenuhi Hak Tenaga Kerja	90%	251.019.000	APBD	Prosentase Perusahaan yang Memenuhi Hak Tenaga Kerja	90%	251.019.000	APBD
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Disnaker	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	251.019.000	APBD	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	251.019.000	APBD
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Prosentase Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan	90%	5.199.226.900	APBD	Prosentase Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan	90%	5.372.664.900	APBD

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	APBD 2025				Rencana Tahun 2025 (Setelah Perubahan)			
			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6		4	5	6	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	75.000.000	APBD	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	122.153.000	APBD
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Disnaker	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	24800 orang	5.124.226.900	APBD	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	24800 orang	5.250.511.900	APBD
					20.738.016.606				30.205.354.160	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target kinerja serta pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini menjadi pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing, adaptif, dan produktif.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan Perubahan Renja ini memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong, khususnya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan perlindungan tenaga kerja.
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029, yang difokuskan untuk mencapai target kinerja jangka menengah secara bertahap.
3. Perubahan Renja ini juga mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025, guna menjaga keselarasan dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.
4. Dalam perumusan kegiatan dan sub kegiatan, juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 serta dinamika kebutuhan pelayanan ketenagakerjaan pada tahun berjalan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Renja ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2025.
2. Dalam penyusunan RKPA, dimungkinkan terjadi penyesuaian berdasarkan hasil review oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong, serta perubahan pada saat pembahasan DPA berdasarkan hasil asistensi dan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Tabalong.
3. Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pencapaian kinerja.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Tahun 2025 secara berkala setiap triwulan, guna memastikan ketercapaian target dan melakukan langkah korektif bila diperlukan.
2. Menjamin kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya dalam bidang peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.
3. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar bidang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, serta dengan lembaga pelatihan, dunia usaha, dunia industri, dan stakeholder terkait lainnya.

Penutup

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, serta

dukungan aktif masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Tabalong.

Akhir kata, semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan pelayanan ketenagakerjaan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan..

Tanjung, Agustus 2025
Mengetahui :
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja



HADY ISMANTO, S.SOS, M.AP
NIP. 19780917 199511 1 001